BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kecurangan akuntansi sendiri menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Yulianti (2016), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu : (1) kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2) pernyataan palsu atau salah pernyataan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan; (3) korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam lembaga pemerintahan sendiri, kecurangan kerap ditemukan. Umumnya kecurangan yang dilakukan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah adalah yang berkaitan dengan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik akhir-akhir ini marak menjadi pemberitaan media masa yang menghebohkan masyarakat. Masyarakat seakan sudah jengah dengan marakanya pemberitaan oknum pejabat publik yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat justru malah melakukan tindak korupsi yang merugikan masyarakat secara luas. Di Indonesia terdapat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satu tujuannya adalah untuk memerangi tindak korupsi. Berdasarkan data dari KPK yang didapat dari website KPK, berikut adalah jumlah tindak korupsi berdasarkan instansi dari periode tahun 2008 sd 2016 : https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasar Instansi

Instansi	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
DPR dan DPRD	7	10	7	2	6	2	2	3	15
Kementrian/lembaga	13	13	16	23	18	46	26	21	39
BUMN/BUMD	2	5	7	3	1	0	0	5	11
Komisi	2	0	2	1	0	0	0	0	0
Pemerintah Provinsi	5	4	0	3	13	4	11	18	13
Pemkab/Pemkot	18	5	8	7	10	18	19	10	21
Jumlah	**47**	**37**	**40**	**39**	**48**	**70**	**58**	**57**	**99**

Dalam tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa instansi pemerintahan baik provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota cukup banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menarik untuk dicari penyebabnya. Di dalam buku Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2012), terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang berbuat kecurangan atau melakukan korupsi, yaitu antara lain: 1. Kurang keteladanan dan kepimimpinan elit bangsa; 2. Rendahnya gaji pegawai negeri sipil (PNS); 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme; 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan; 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas, dan jabatan dan lingkungan

masyarakat; dan 7. Lemahnya tingkat keimanan, kejujuran, rasa malu, moral serta etika.

Alasan-alasan mengapa seseorang melakukan kecurangan atau tindakan korupsi tersebut hampir senada dengan beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengetahui penyebab seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) yaitu pengaruh perilaku tidak etis, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi pemerintah kabupaten Pasaman Barat (Yuliani,2018), pengaruh keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar (Fachrunisa,2015), analisis pengaruh keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi (Fauwzi,2011). Beberapa penelitian tersebut menunjukan hasil yang berbeda dikarenakan beragamnya variabel, sampel dan populasi, serta metodelogi penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan pada Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi)."

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi ?
2. Apakah persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?
3. Apakah ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Bekasi?

4. Apakah pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi dan ketaatan pada aturan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
2. Mengetahui pengaruh persepsi kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
3. Mengetahui pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
4. Mengetahui pengaruh pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, dan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai sistem akuntansi pemerintahan kota Bekasi, khususnya faktor-faktor yang dapat membuat seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan akuntansi dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
2. Bagi pemerintahan kota Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan, serta dapat menambah informasi untuk meminimalisasi kecurangan akuntansi dengan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi bagi

teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang menyusun skripsi atau melakukan penelitian, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.